

DAFTAR PUSTAKA

Kepustakaan

- A, R. Permata Hastuti A dan F, Milla Fitri. 2016. "Asuransi Konvensional, Syariah, dan BPJS". Parama Publishing. Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. "Pengantar Metode Penelitian Hukum". Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Rajawali Press. Jakarta.
- Bank Indonesia. 1999. "Penerapan Z-score Untuk Memprediksi Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan Perbankan Indonesia". BI. Jakarta.
- Bruggink. 1996. *Rechtsreflecties*. Terjemahan: Arif Sidharta. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Declerecq, Peter J.M., 2002, "Netherlands Insovensy Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept, T.M.C. Asset Press, The Haque, hlm.T.M.C. Asset Press, The Haque.
- Djohansyah, D. 2004. "Kreditor Preferen dan Separatis Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya", Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2014. "Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek". Penerbit PT Citra Adiyta Bakti, Bandung.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2002. "Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Jaminan". Ind-Hill-Co. Jakarta.
- Kartono. 1982. "Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran". Pradnya Paramita. Jakarta.
- Levinthal, Louis E. 1999. "The Early History of Backrupcy Law". Foundation Press.
- Mahadi. 2003."Falsafah Hukum : Suatu Pengantar". Alumni. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. "Hukum Asuransi Indonesia". Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. "Hukum Asuransi Indonesia". Cetakan Keempat. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum". PT. Aditya Citra Bakti. Bandung.

- Mulyadi, Kartini. 2001. "Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang". Alumni. Bandung.
- Muljadi, Kartini Muljadi. "Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga : Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". Alumni. Bandung.
- Nasution, Az. 2002. "Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar". Daiadit Media. Jakarta.
- Nurdin, Andriani. 2004. "Masalah Seputar Actio Pauliana". Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Oughtton, David Oughtton dan John Lowry. 1997. "Textbook On Consumer Law". first ed. Blackstone Press Limited.
- Pane, Marjan E. 2005. "Inventarisasi dan Verifikasi Dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya". Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986, "Ilmu Hukum". Penerbit Alumni. Bandung.
- Sastrawidjaja, Dr. M. Suparman. 1997. "Hukum Asuransi dan Surat Berharga". PT. Alumni. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2016. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat". Rajawali Press. Jakarta.
- Shidarta. 2006. "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia". Cet. III, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. "Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan". Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Simanjuntak, Ricardo. 2005. "Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan". Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy Sjahdeini. 2009. "Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No, 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan". Pustaka Utama Grafiti.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. "Hukum Tentang Perlindungan Konsumen". Cet. III, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Internet

Kusuma, Dewi Rachmat. “Asuransi Jiwa Bumi Asih Pailit, Pemegang Polis Diminta Ajukan Tagihan”.
<http://finance.detik.com/read/2016/06/23/170047/3240632/5/asuransi-jiwa-bumi-asih-pailit-pemegang-polis-diminta-ajukan-tagihan>. Diakses pada 07 Oktober 2016.

Widianto, Satrio. “Perkembangan Asuransi Meningkatkan Signifikan”,
<http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2015/11/08/349103/perkembangan-asuransi-meningkat-signifikan>. Diakses 09 September 2016.

(Tanpa Penulis). “Perkembangan Perusahaan Asuransi di Indonesia”,
<https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-perusahaan-asuransi-di-indonesia>. Diakses pada 20 September 2016.

(Tanpa Penulis). “Perkembangan Asuransi di Indonesia”,
<https://www.cermati.com/artikel/perkembangan-perusahaan-asuransi-di-indonesia>. Diakses pada 08 Oktober 2016.

(Tanpa Penulis). “Enam Prinsip Asuransi Yang Perlu Kita Ketahui”,
<http://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/6-prinsip-asuransi-yang-perlu-kita-ketahui>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2017.



Artikel

Nasution, A.Z. 1995. "Konsumen dan Hukum". Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
Mengutip Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985, bagian II angka 3, naskah yang menjadi pedoman perlindungan kepentingan konsumen tersebut adalah kesimpulan dari penelitian yang panjang sejak tahun 1973-1985, yang dilakukan oleh negara-negara anggota PP atas kerjasama dengan organisasi-organisasi PBB, antara ECOSO, UNICEF, UNDP, WHO, UNESCO, dll.